

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Sharia Enterprise Theory* (SET)

Teori ini menjelaskan bahwa Allah SWT. merupakan posisi utama dari amanah, sedangkan sumber yang dimiliki para pemangku kepentingan (stakeholder) merupakan amanah yang berasal dari Allah SWT. dimana mencakup suatu tanggung jawab guna dimanfaatkan melalui cara serta tujuan yang sudah menjadi ketetapan oleh Allah SWT.¹

Berdasarkan penjelasan teori SET yang umumnya memiliki kepedulian oleh para pemangku kepentingan. Menurut teori ini, pemangku kepentingan yang dimaksud yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan adalah bagian yang menempati posisi tertinggi dan merupakan sumber utama tujuan hidup manusia. Konsekuensi dari menetapkan Allah sebagai pemangku kepentingan tingkat atas adalah menjadikan Sunnahtullah sebagai dasar dari segalanya. Termasuk dalam proses pengungkapan tanggungjawab lingkungan dan kegiatan sosial perusahaan. Sedangkan pemangku kepentingan kedua adalah manusia.²

2. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder theory berpandangan bahwa perusahaan bukan hanya entitas yang menjalankan aktivitas di bidang kegiatannya, tetapi juga perlu memberikan manfaat bagi para stakeholder (pemangku kepentingan). Agar bisnis dapat tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang, diperlukan dukungan dari para pemangku kepentingannya. Perusahaan bukan hanya bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan atas indikator ekonomi, tetapi juga meluas, terutama di dunia sosial (stakeholder) dengan memperhatikan faktor sosial (stakeholder), aspek sosial, maka muncullah istilah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).³

¹ Kartika Rachmasari Yevi Dwitayanti, Rosy Armaini, "Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 2, no. 2 (2018): 163.

² Luluk Prihatiningsih dan Nur Hayati, "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*", *JRAK* 12, no. 1 (2021): 4.

³ Entherthiman Galvani Tampubolon dan Dina Arfianti Siregar, "Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab

Dari penjelasan di atas, maka teori stakeholder ini sesuai jika digunakan pada penelitian ini karena stakeholder mempunyai hak mengetahui informasi terkait tanggungjawab sosial yang dijalankan perusahaan. Oleh karenanya, dibutuhkan praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan perusahaan. Dalam hal ini bukan hanya bermanfaat bagi keperluan perusahaan saja, namun juga memberikan manfaat bagi stakeholder.

3. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori ini mengemukakan bahwa suatu bisnis dapat bertahan di masyarakat apabila melakukan kegiatan bisnisnya berdasarkan nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar. Teori ini menjadi bagian strategi bagi perusahaan yang sedang berkembang. Cara ini bisa digunakan dalam membangun strategi perusahaan sebagai upaya untuk beradaptasi dengan masyarakat yang semakin maju.⁴

Dari penjelasan teori di atas, maka teori legitimasi ini sesuai digunakan pada penelitian ini, karena dalam masyarakat perusahaan perlu memposisikan keberadaannya sudah sesuai dengan sistem yang dimiliki masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan praktek pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, suatu entitas bisnis dapat melaksanakan pertanggungjawaban sosialnya melalui *annual report* perusahaan.

4. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini mengemukakan terkait hubungan diantara manajer atau pihak manajemen dan pemilik perusahaan atau pemegang saham atas dasar pemisahan kepemilikan dan pengendalian bisnis, pemisahan penanggung risiko, pengambilan keputusan dan fungsi pengendalian.⁵

Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka teori keagenan sesuai digunakan pada penelitian ini dikarenakan pada perspektif agensi, manajemen mempunyai lebih banyak informasi terkait perusahaan, lingkungan kerjanya, dan prospeknya di masa

Sosial Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Maneksi* 8, no. 2, (2019): 223-29.

4 Yulinda Tarigan dan Danu Adisaputra, "Pengaruh *Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure*", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis* 8, no. 2, (2020): 163-70.

5 Mike Sonita Sari and Nayang Helmayunita, "Pengaruh *Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting*" 751-68. <https://doi.org/10.24036/jea.vli2.108>

mendatang daripada pemilik perusahaan, karena manajer bertindak sebagai pengelola. Oleh karena itu, pengungkapan informasi terkait praktek tanggungjawab sosial perusahaan menjadi penting. Dikarenakan pemilik perusahaan tidak dapat langsung mengawasi operasional keseharian manajemen dan menetapkan bahwa operasional manajemen berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemilik perusahaan.

5. *Corporate Social Responsibility*

a. Definisi *Corporate Social Responsibility*

CSR adalah bentuk upaya sistematis oleh perusahaan secara struktur, proaktif serta seimbang untuk melaksanakan kegiatan usaha yang bisa diterima secara sosial dan ramah lingkungan untuk tercapainya kesuksesan finansial, maka hal ini mampu memberikan *value added* bagi stakeholder.⁶

Berdasarkan *The Work Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) melalui publikasinya "*Making Good Business Sense*" menuturkan bahwa CSR: "Komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya".

Definisi tersebut memperlihatkan bahwa CSR merupakan bentuk pertimbangan bisnis dengan tujuan demi meningkatnya ekonomi, meningkatkan taraf hidup karyawan dan keluarganya, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar maupun masyarakat umum.⁷

b. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*

Menurut A. Sonny Keraf setidaknya terdapat 4 ruang lingkup tanggungjawab sosial oleh perusahaan, yaitu :

- 1) Keterlibatan perusahaan dalam berbagai aktivitas sosial yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Aktivitas sosial ini sangat beraneka ragam, dapat berupa penggalangan dana bagi pembangunan tempat ibadah, infrastruktur dan sarana prasarana sosial seperti listrik, jalan, air, taman hiburan dan tempat rekreasi, melaksanakan penghijauan, melindungi sungai dari polusi, menjalankan kerjasama antar perusahaan besar

6 Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility Edisi 2, E-Book*, 1st edn (Yogyakarta: Expert, 2018), 66.

7 Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 22.

dan kecil, pemberian beasiswa bagi keluarga yang kurang mampu dan lain-lain.

- 2) Keuntungan ekonomis, hal ini dapat menciptakan pandangan positif terhadap perusahaan, sehingga meyakinkan masyarakat untuk menerima keberadaan produk perusahaan.
- 3) Menjalankan sistem norma yang terdapat di masyarakat, baik dalam urusan bisnis ataupun yang berkaitan dengan kehidupan sosial, agar kelangsungan bisnis berjalan dengan baik.
- 4) Patuh terhadap hak dan kepentingan stakeholders baik secara langsung maupun tidak langsung terkait kegiatan bisnis perusahaan.⁸

c. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Menurut Social Crowther David (2008) menyatakan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial ada tiga, yaitu:

- 1) *Sustainability*, merupakan prinsip mengenai operasional bisnis dalam melaksanakan usahanya dengan tetap memperhitungkan keseimbangan sumber daya dimasa mendatang.
- 2) *Accountability*, yaitu suatu bentuk upaya perusahaan untuk bersikap terbuka serta bertanggung jawab terkait kegiatan bisnis yang dilakukan.
- 3) *Transparency*, adalah prinsip utama bagi pihak eksternal. Transparansi berkaitan dengan laporan kegiatan perusahaan dan akibatnya bagi pihak eksternal, serta berperan mengurangi kesalahan terkait informasi tanggungjawab terhadap lingkungan.⁹

d. Tanggungjawab sosial perusahaan dalam Undang-Undang

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah persoalan baru yang tercakup dalam ketentuan UU tentang perseroan terbatas ini. Peraturan ini bertujuan sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan pada lingkungan dan situasi di sekitar lokasi usaha. Peraturan-peraturan ini tidak bersifat menyeluruh, namun mengandung batasan dan syarat-syarat tertentu yang dipenuhi oleh peraturan tersebut

8 Sunaryo, S.H. M. Hum., "Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Berbagai Perspektif Kajian", (Bandar Lampung ; CV. Anugrah Utama Raharja, 2015), 12.

9 Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, 79-81.

yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan ini juga bertujuan dalam menciptakan hubungan antara perusahaan yang seimbang, serta menyesuaikan adanya nilai, norma, dan budaya masyarakat sekitar.

Pasal 74 UU No. 40 Th 2007 ini berlaku bagi perseroan yang aktivitas usahanya berkaitan dengan SDA. Bentuk tanggung jawab ini bukan hanya berlaku bagi perusahaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, namun juga pada bidang keuangan, seperti perbankan dan lembaga keuangan, bank atau non bank. Sehingga dapat mempengaruhi opini publik agar dapat memilih perusahaan yang lebih peduli terhadap lingkungan masyarakat.

e. *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif Islam

Tercetusnya CSR dalam konsep islam diharapkan melahirkan konsep dan praktik akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam. Instrumen tersebut memberikan kontribusi kepada kemajuan bisnis yang lebih jujur dan adil. Oleh karena itu dengan mempersiapkan konsep akuntabilitas sosial akan mendorong terpenuhinya kebutuhan publik atas suatu informasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep akuntabilitas sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan suatu informasi. Dalam konteks Islam, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai informasi mengenai aktivitas organisasi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan tetap melakukan kegiatannya sesuai syariah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk memberikan pengungkapan penuh dalam konteks Islam yaitu dengan penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*.¹⁰

Teori ICSR pertama kali dikemukakan oleh Haniffa, kemudian dikembangkan secara ekstensif oleh Othman et al., secara spesifik di Malaysia. Menurut Haniffa terdapat keterbatasan dalam laporan sosial konvensional sehingga ia mengemukakan sebuah kerangka konseptual ICSR yang berdasarkan ketentuan syariah Islam. Kerangka konseptual

¹⁰ Muhammad Taufiq Abadi, Ria Anisatus Sholihah , dan Muhammad Sultan Mubarak, 'Implementasi *Islamic Social Reporting Index* Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah', *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6, No. 1 (2020), 1–25.

ini tidak hanya membantu para pengambil keputusan muslim, tetapi juga membantu perusahaan dalam menjalankan aktivitas dan pelaporan yang sesuai ketentuan syariah. Hal ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap Allah Swt. dan masyarakat sekitarnya.¹¹

Keberadaan Al-Qur'an tidak hanya sebagai kitab suci semata, namun Al-Qur'an juga merupakan sebuah petunjuk bagi seluruh umat manusia yang didalamnya berisi segala solusi dari permasalahan yang ada di muka bumi baik permasalahan hukum, ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Dalam islam manusia diartikan sebagai khalifah di bumi yang mana tugas manusia tidak cukup hanya untuk beribadah kepada Allah SWT semata (*habluminallah*) melainkan juga dibarengi dengan berlaku baik kepada makhluk hidup lainnya (*habluminannas*), dan juga dalam menjalankan kegiatan baik dalam hal ekonomi, sosial dan lainnya, disini islam mengajarkan untuk melakukannya bukan hanya berorientasi untuk kepentingan dunia saja tetapi yang terpenting adalah untuk memperoleh keridhoan-Nya.¹²

Tanggung jawab sosial dalam islam bukanlah merupakan sesuatu yang asing, karena ini sudah ada dan dipraktekkan sejak 14 abad yang lalu. Dalam Al-Qur'an pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 205: Artinya:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

“Dan apabila dia berpaling (dari Engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak

¹¹ Muhammad Taufiq Abadi, dkk , ‘Implementasi Islamic Social Reporting Index, 1–25.

¹² Isnan Murdiansyah, ‘Leverage , Ukuran Dewan Komisaris , Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Tahun 2015-2018’, *Journal of Islamic Banking and Finance*, 5, no. 1 (2021), 43–56.

tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS. Al-Baqarah : 205).¹³

Dalam ayat tersebut menjelaskan kepedulian terhadap alam sekitar, Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat serius bagi bisnis atau bukan bisnis untuk selalu memastikan kelestarian alam. Pada aspek kebajikan, islam sangat menganjurkan membantu orang-orang yang memerlukan dan kurang mampu dalam berusaha melalui sadaqah dan pinjaman kebajikan (*qard hasan*). Kenyataan diatas menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab sosial dan konsep keadilan telah lama wujud dalam islam, seiring dengan kehadiran islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

CSR dalam konsep perspektif islam sebagai pelaku ekonomi dituntut untuk tidak saling bertentangan dalam tindakan dan perkataannya ketika mengelola kegiatan usahanya. Mereka diajarkan untuk tepat janji, tepat waktu, jujur atas kelemahan dan kekurangannya (tidak ada yang disembunyikan), menjaga kualitas barang dan jasa secara berkesinambungan, bebas penipuan dan kebohongan. Pelaku usaha atau bagian dari usaha harus berkewajiban dengan menunjukkan sikap jujur, terbuka, pelayanan yang baik, dan ihsan (perbuatan baik) dalam berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat.¹⁴

Bentuk kebijakan perusahaan pada implementasi tanggungjawab sosial perusahaan berdasarkan perspektif Islam dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

- 1) Tanggungjawab sosial terhadap pemangku kepentingan dan pihak internal perusahaan. Artinya, dalam islam tanggungjawab sosial bertindak menjamin hubungan bisnis yang baik dan saling menguntungkan antar perusahaan mulai dari pihak internal ke eksternal perusahaan.

¹³ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 205, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2006), 40.

¹⁴ Dicky Sony Saputra dan Ali Muhtarom, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Moderasi Beragama: Konsep dan Pendekatan dalam Etika Bisnis Islam di Lembaga Perbankan Syariah*, 2020.

- 2) Tanggungjawab sosial bagi lingkungan sekitar. Artinya, tanggungjawab sosial berperan dalam perlindungan lingkungan dari lingkungan abiotik ke lingkungan biotik.
- 3) Tanggungjawab sosial bagi lingkungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Artinya tanggungjawab sosial berkontribusi mensejahterakan lingkungan sosial masyarakat. Hal ini adalah ciri khas Islam yang mengedepankan hubungan sosial dan mendorong umatnya untuk selalu bermurah hati.¹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa pada prinsipnya semua kegiatan usaha harus diperhatikan. Aktivitas usaha dapat terlaksana dalam periode yang lebih lama apabila semua aspek dipertimbangkan dengan memberi batas akses dan penggunaan aset mereka dan melihat aspek halal dan haram dari kegiatan usaha tersebut.

6. Profitabilitas

a. Definisi profitabilitas

Suatu perusahaan memiliki pencapaian utama dalam bisnisnya terutama dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dengan mencapai keuntungan tertinggi, perusahaan mampu menjalankan berbagai hal dalam kepentingan pemilik dan karyawan, peningkatan kualitas barang serta melakukan investasi baru. Oleh karena itu, pada kenyataannya suatu entitas harus mampu mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Artinya jumlah pendapatan yang akan diperoleh harus tercapai sesuai harapan.

Rasio profitabilitas yaitu suatu ukuran yang dimanfaatkan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan (laba). Indikator profitabilitas juga memberikan ukuran efektivitas pengelolaan bisnis.

Indikator laba biasa digunakan untuk membandingkan komponen-komponen pelaporan keuangan, khususnya laporan neraca serta laporan laba rugi. Pengukuran biasa dilakukan pada beberapa waktu periode. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi atau

15 Ahmad Very Fadli dan Yuliani, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus PT. Kimia Farma, Tbk)", *E-Journal Al-Dzahab* 3, no. 1 (2022): 50–60.

meningkatkan pertumbuhan perusahaan selama periode waktu tertentu dan menemukan alasan perubahan tersebut.

Pengukuran ini dapat digunakan sebagai alat untuk menilai apa yang telah dilakukan manajemen selama ini. Apabila tujuan yang telah ditetapkan tercapai, bisa dikatakan bahwa tujuan tersebut berhasil dalam jangka waktu tertentu atau beberapa periode. Di sisi lain, jika tidak mencapai apa yang telah ditetapkan, itu adalah pelajaran manajemen di periode berikutnya. Ketidakberhasilan ini harus diselidiki untuk menentukan posisi kesalahan dan kerentanannya agar kegagalan tersebut tidak terjadi kembali. Gagal atau suksesnya manajemen ini bisa dijadikan pedoman untuk perencanaan laba di masa mendatang dan dapat menjadi peluang untuk merubah manajemen baru, khususnya jika manajemen lama telah gagal.¹⁶

Para tokoh berpendapat bahwa profitabilitas dalam Islam merupakan profit yang dicapai dengan tujuan atau orientasi yang sama, yaitu akhirat. Untuk mencapai tujuan akhirat tersebut tentu kita membutuhkan jalan yang harus dilalui, sebagaimana sejalan dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengikuti firman Allah SWT dan Sabda Rasul-Nya. Karna sesungguhnya setiap kehidupan kita di dunia sudah ada yang mengaturnya. Profitabilitas dalam perspektif Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, menjadi suatu acuan kita dalam mencapai sebuah tujuan profitabilitas tanpa meninggalkan orientasi akhirat. Banyak makna lain, selain keuntungan angka ataupun materil. Karena sesungguhnya angka ataupun materil tersebut hanya merupakan suatu alat guna mencapai tujuan akhirat tersebut.¹⁷

7. Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan yang baik, secara terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance*. Dalam perspektif Islam jika dikaitkan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”.

16 Kasmir, S.E.,M.M., *Analisis Laporan Keuangan, E-Book*, 1st edn (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 196-197.

17 Putri Pratama dan Jaharuddin, ‘Rekonstruksi Konsep Profitabilitas Dalam Perspektif Islam’, *Ikraith-Humaniora*, 2, no. 2, (2018), 101–8.

Artinya Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks keIslaman. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami. Namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam.¹⁸

8. Komisaris Independen

Implementasi tata kelola perusahaan harus mempunyai komisaris independen. Berdasarkan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 (pasal 1) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen adalah:

“Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”.

Komisaris independen yaitu anggota dari dewan komisaris di luar direksi perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan, namun terlibat dalam perusahaan internal. Perseroan membentuk komisaris independen yang akan membawahi internal organisasi dan dapat menjadi penengah ketika terjadi pertikaian antara komisaris internal dengan pemegang saham. Komisaris independen dapat dipercaya sebagai perantara antara kedua belah pihak karena memiliki tujuan dan tidak menimbulkan risiko konflik internal yang tinggi.

Semenjak datangnya Alquran dan Sunnah Rasulullah telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan, non peradilan, dunia bisnis, dan lain sebagainya. Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara diluar peradilan. Secara implisit dijelaskan oleh Umar bin Khattab ra: *“Kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak”*. Banyak ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang

¹⁸ Shofia Mauizotun Hasanah dan Romi Kurniawan, ‘Konsep Islamic Corporate Governance Sebagai Tata Kelola Perusahaan Bakpiapia Djogja’, *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 1, no. 2, (2019), 73.

manajemen konflik diantaranya surah Al-Baqarah ayat 176 yang berbunyi:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ أَحْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي

شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al-Kitab dengan membawa kebenaran dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al-Kitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran)” (QS. Al-Baqarah : 176).¹⁹

Sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut, jika dikaitkan dengan tugas komisaris independen sebagai penengah antara kedua belah pihak, maka dengan adanya komisaris independen ini akan mengurangi konflik manajemen dan meningkatkan operasional perusahaan, artinya makin besar anggota komisaris independen, maka makin tinggi juga pengungkapan tanggungjawab perusahaan.

9. Komite Audit

Komite audit mempunyai wewenang dalam melakukan penyelidikan dan menyetujui kasus-kasus dalam cakupan tanggung jawab tugasnya. Menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA), perusahaan wajib mempunyai komite audit yang dibentuk untuk jadi komite tetap. Pembentukan komite audit di organisasi lain juga sangat direkomendasikan oleh IIA, termasuk pembentukan komite audit di organisasi nirlaba dan pemerintah. Komite audit memiliki tanggungjawab utama dalam membantu direksi selama melaksanakan tugas, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian internal, kebijakan akuntansi, serta laporan keuangan perusahaan.²⁰

Jika dikaitkan pada konsep syariah, tugas komite audit dalam menindaklanjuti serta mengevaluasi hasil kerja internal audit disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Komite audit bertanggungjawab secara professional dan independen tanpa

¹⁹ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 176, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2006),33.

²⁰ FGCI, "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan) (*The Roles of the Board of Commissioners and the Audit Committee*), 9-11. <http://www.fgci.or.id>

campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai peraturan komite audit, hal ini agar tercapainya praktik pengendalian internal, kebijakan akuntansi, serta pelaporan keuangan yang baik. Dengan demikian adanya komite audit ini akan meningkatkan kinerja operasional perusahaan, sehingga nantinya meningkatkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

10. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan total kepemilikan saham pihak manajemen terhadap jumlah seluruh modal saham yang dikelola perusahaan. Kepemilikan pihak manajemen disamakan dengan kepentingan pemilik perusahaan dan manajer, dikarenakan secara langsung manajer ikut merasakan hasil dari pengambilan keputusan dan mengambil risiko dari keputusan yang dibuat karena kesalahan.

Dalam bisnis, manajemen harus transparan untuk menghindari konflik kepentingan bagi pemilik saham. Pihak manajemen yang mempunyai saham di perusahaan tentu saja mensejajarkan urusannya dengan pemegang saham. Di sisi lain, pihak manajemen yang tidak mempunyai saham di perusahaan hanya mementingkan urusan pribadi mereka.²¹

Dilihat dari sudut pandang islam, kepemilikan manajerial menugaskan manajerial berperan ganda sebagai pemilik dan pengelola. Dalam islam mengakui adanya kepemilikan saham pribadi dan memperbolehkan untuk menggunakan dan mengelola saham pribadinya dengan berbagai upaya sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan manajerial maka makin tinggi pengungkapan ICSR.

B. Penelitian Terdahulu

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No .	Nama Peneliti dan Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Vika Fitranita dan Indah oktari	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kinerja	Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan	Variabel yang digunakan sama yaitu	Periode penelitian yang diambil

21 Kepemilikan Institusional, Mekanisme *Corporate Governance*, (2015), 10. <http://repository.unri.ac.id>

	Wijayanti, (2020). ²²	Lingkungan, Pertumbuhan Penjualan dan <i>Leverage</i> Pada Pengungkapan <i>Islamic Corporate Social Reporting</i>	terhadap pengungkapan ICSR	profitabilitas.	yaitu tahun 2016-2018, dan mengambil data pada Indeks Saham Syariah Indonesia .
2.	Agung Hendratmoko & Abdul Muid et al, (2017). ²³	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Pengungkapan ICSR Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	Profitabilitas terbukti berpengaruh signifikan terhadap ICSR.	Variabel yang digunakan sama yaitu profitabilitas.	Periode penelitian yang diambil yaitu tahun 2016-2018, dan mengambil data pada Indeks Saham Syariah Indonesia
3.	Siti Khotijah, Anik Malikhah, dan	Faktor Yang Mempengaruhi <i>Islamic Social Responsibility</i>	Profitabilitas atau ROA terbukti berpengaruh signifikan	Variabel yang digunakan sama yaitu profitabilitas	Periode penelitian yang diambil yaitu

22 Vika Fitranita dan Indah Oktari Wijayanti, "Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kinerja Lingkungan, Pertumbuhan Penjualan dan *Leverage* Pada Pengungkapan *Islamic Corporate Social Reporting*", *JAF-Journal of Accounting and Finance* 4, no. 1 (2020): 29 .
<http://doi.org/10.25124/jaf.v4i1.2344>

23 Agung Hendratmoko & Abdul Muid, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan: 1–11.

	Junaidi, (2019). ²⁴	y (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2021-2016)	terhadap ICSR.	as.	tahun 2012-2016, dan mengambil data perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia .
4.	Dewi Rachmania & Nurul Alviana et al, (2020) ²⁵	Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR) (Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018)	Variabel GCG pada proksi komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ICSR.	Variabel yang digunakan sama yaitu Tata kelola perusahaan (GCG) dengan indikator komite audit	Periode penelitian yang diambil yaitu tahun 2014-2018, dan mengambil data pada Bank Umum Syariah di Indonesia
5.	Riri	Pengaruh	Variable	Variable	Periode

24 Siti Khotijah,dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Islamic Social Responsibility* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2012-2016)", *E-JRA* 8, no.5 (2019): 1–9.

25 Dewi Rachmania and Nurul Alviana, "Pengaruh Kinerja Keuangan dan Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR):49. <https://doi.org/10.31000/c.v4il.2317>.

	Mayliza dan Arie Yusnelly, (2021) ²⁶	<i>Good Corporate Governance Terhadap Islamic Social Responsibility</i>	GCG pada proksi komite audit tidak berpengaruh positif terhadap ICSR	yang digunakan sama yaitu komite audit	penelitian yang diambil yaitu tahun 2014-2020, dan mengambil data pada Bank Umum Syariah di Indonesia
--	---	---	--	--	---

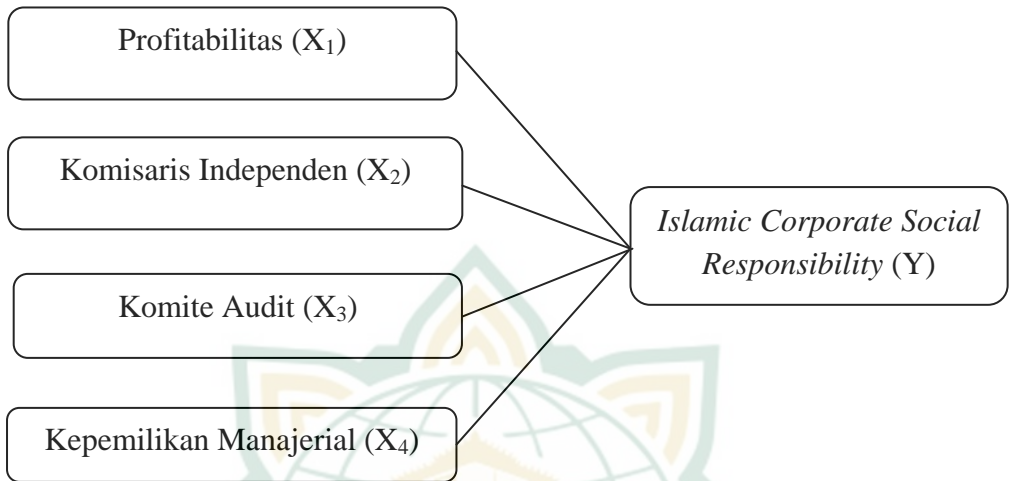
Dari tabel di atas pada penelitian terdahulu ditemukan beberapa persamaan ataupun perbedaan terhadap hasil riset terdahulu. Letak persamaan penelitian terdahulu terhadap penelitian ini yaitu sama-sama mengambil variabel terikat ICSR dengan variabel bebas berupa profitabilitas, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada penambahan indikator variabel tata kelola perusahaan yaitu kepemilikan manajerial. Selain itu, untuk objek penelitian ini juga berbeda dengan sebelumnya yaitu perusahaan bidang kesehatan yang terdaftar di BEI khususnya ISSI. Untuk periode penelitian ini diambil data pada tahun 2018-2020.

C. Kerangka Berfikir

Agar lebih memperjelas tujuan penelitian ini, disini perlu diuraikan konsep pemikiran penelitian, sehingga peneliti dapat merumuskan uraian masalah di atas. Deskripsi kerangka teori berpikir penelitian ini adalah:

26 Riri Mayliza dan Arie Yusnelly, "Pengaruh *Good Corporate Governance*: 369–79.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sebuah perusahaan yang bertanggungjawab menginformasikan *annual report* kepada pihak berkepentingan, dalam hal ini perusahaan sektor kesehatan harus mampu mengoperasikan perusahaan dengan baik. Disini dapat dilihat dari laporan keuangan yang didalamnya terdapat indikator profitabilitas (X_1), komisaris independen (X_2), komite audit (X_3), kepemilikan manajerial (X_4). Beberapa indikator tersebut dapat mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Ketika sebuah perusahaan dapat mengelola operasional bisnisnya dengan baik, dan mampu mewujudkan tanggungjawab sosialnya, maka keberadaan perusahaan di masyarakat maupun di mata investor juga akan dipandang baik.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara pada tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka berpikir. Hipotesis yaitu sebuah pernyataan terkait hubungan antara dua variabel atau lebih.

1. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*

Menurut *Sharia Enterprise Theory* (SET), laporan keuangan harus dapat menyatakan kepada semua pihak bahwa suatu perusahaan telah memenuhi kewajibannya kepada Tuhan dan kepada pihak berkepentingan sebagaimana diarahkan oleh Tuhan serta sejalan terhadap maksud dan tujuan ketetapan dalam syariah. ICSR merupakan bagian dari implementasi prinsip islami yang bukan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan

tetapi juga untuk tujuan akhirat.²⁷ Hal ini dikarenakan perusahaan memandang pengungkapan ICSR sebagai suatu kebutuhan. Perusahaan menyadari bahwa pengungkapan ICSR sangat penting sebagai wujud transparansi perusahaan untuk dapat menambah kepercayaan serta nilai perusahaan dimata para pengguna laporan.

Sedangkan pada teori stakeholder, menjelaskan bahwa aktivitas manajemen perusahaan dalam menyusun laporan sejalan dengan tujuan perusahaan dan dukungan stakeholders yakni meningkatkan tingkat profitabilitas sehingga mampu menarik investor. Salah satu usaha perusahaan dalam memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat dan calon investor adalah dengan meningkatkan kesadaran ICSR. Dengan demikian, makin tinggi laba maka makin besar pula kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan, maka semakin luas pengungkapan tanggungjawab perusahaan dan biaya pengungkapan ICSR juga meningkat.

Sehubungan dengan pengaruh profitabilitas terhadap ICSR, terdapat penelitian terdahulu oleh Agung Hendratmoko²⁸, Siti Khotijah, Anik Malikhah, dan Junaidi²⁹, dan Prisila Damayanti, Hendi Prihanto, & Prof. Dr. Moestopo Fairuzzaman³⁰ yang membuktikan profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan positif terhadap ICSR, hal ini tercermin dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, perusahaan akan mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosial, yang nantinya akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap barang yang dijual perusahaan. Sehingga, berdasarkan penelitian terdahulu yang juga menggunakan variabel profitabilitas, maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut:

H₁: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*.

27 dan Linda Lamey Rena Mustari Mokoginta, Herman Karamoy, 'Pengaruh Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Bank Syariah di Indonesia', (2018) : 55–71.

28 Agung Hendratmoko, *Pengaruh Profitabilitas*.

29 Siti Khotijah, dkk, *Analisis Faktor-Faktor*.

30 Prisila Damayanti, dkk, "Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kepemilikan Saham Publik dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 2, (2021): 94–104.

2. Pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*

Komisaris independen sebagai alat efektif untuk mengendalikan etika manajerial, dapat mempengaruhi pengendalian dan pengelolaan operasi perusahaan terutama dalam pengungkapan CSR. Berdasarkan teori legitimasi menyatakan persepsi masyarakat terhadap legitimasi perusahaan bisa diperkuat apabila dalam perusahaan ada komponen komisaris independen, sehingga hal ini tidak menyulitkan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap operasional perusahaan.³¹

Sehubungan dengan pengaruh komisaris independen terhadap ICSR, terdapat penelitian terdahulu oleh Yulinda Tarigan³², Riri Mayliza & Arie Yusnelly³³, dan Indira Shinta Dewi³⁴ membuktikan bahwa ada pengaruh signifikan positif pada komisaris independen terhadap ICSR. Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu yang juga menggunakan variabel komisaris independen, maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut:

H₂: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*.

3. Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*

Komite audit ditetapkan sebagai media paling efektif untuk menerapkan mekanisme manajemen, mengurangi biaya kantor, serta menambah tingkat kualitas pengungkapan informasi perusahaan.³⁵ Berdasarkan *Sharia Enterprise Theory* (SET), pemilik bisnis berusaha untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin serta memastikan bahwa perusahaan

³¹ Annas Rizka Amalia Dan Muhammad Jafar Shodiq, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Lingkungan', *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 5, (2021): 234–56.

³² Yulinda Tarigan dan Danu Adisaputra, *Pengaruh Good Corporate Governance*.

³³ Riri Mayliza dan Arie Yusnelly, *Pengaruh Good Corporate Governance*.

³⁴ Indira Shinta Dewi, SE., MM., "Pengaruh Mekanisme Internal *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi* 5, no. 2, (2020): 37–54.

³⁵ Yulinda Tarigan dan Danu Adisaputra, *Pengaruh Good Corporate Governance*.

bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat menurunkan terjadinya konflik antara pemegang saham dan manajemen.³⁶

Sehubungan dengan pengaruh profitabilitas terhadap ICSR, terdapat penelitian terdahulu oleh Dewi Rachmania & Nurul Alviana et al³⁷, dan Indira Shinta Dewi³⁸ yang membuktikan adanya pengaruh signifikan positif komite audit terhadap pengungkapan ICSR. Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu yang juga menggunakan variabel komite audit, maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut:

H₃: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*.

4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*

Pada perspektif teori keagenan, manajemen sebagai manajer bisnis mempunyai banyak informasi tentang perusahaan, lingkungan kerja dan perspektif masa depan perusahaan daripada pemilik perusahaan. Sementara itu, pemegang saham akan memperhatikan kinerja manajer dalam mengelola laba perusahaan agar bertindak sesuai keinginan. Ini pasti akan meningkatkan produktivitas dan nilai bisnis. Semakin meningkat produktivitas manajemen, maka makin tinggi juga tingkat pengungkapan CSR perusahaan.

Sehubungan dengan pengaruh variabel kepemilikan manajerial terhadap ICSR, terdapat penelitian terdahulu oleh Yulinda Tarigan³⁹, dan Ester Ayu Febriana, Abdul Halim & Ati Retna Sari⁴⁰ menyatakan bahwa berdasarkan pengujian variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan pada ICSR. Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu yang juga

36 Luluk Prihatiningsih dan Nur Hayati, *Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan*.

37 Dewi Rachmania, *Pengaruh Kinerja Keuangan*.

38 Indira Shinta Dewi, SE., MM., *Pengaruh Mekanisme Internal Corporate Governance*.

39 Yulinda Tarigan dan Danu Adisaputra, *Pengaruh Good Corporate Governance*..

40 Ester Ayu Febriana, dkk, "Pengaruh Elemen-Elemen *Corporate Governance* dan Kualitas Audit Terhadap Luas Pengungkapan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015)", *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 8, no.1, (2019): 1–14.

menggunakan variabel kepemilikan manajerial, maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility*.

